

**ANALISIS AKUNTANSI KOPERASI PADA KOPERASI  
UNIT DESA (KUD) SAWITRA KECAMATAN KUNTO  
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



Oleh :

**ALMUNTAZOR**

**NIM : 10373023583**

**JURUSAN AKUNTANSI (S1)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
2010**

## **ABSTRAKSI**

### **ANALISIS AKUNTANSI KOPERASI PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SAWITRA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

**Oleh :**

**Almuntazor**

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Koperadi Unit Desa (KUD) Sawitra telah menerapkan akuntansi perkoperasian sesuai PSAK No 27 Tahun 2009.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data Primer dan data Skunder yang berupa laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak koperasi, struktur organisasi koperasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUD Sawitra tidak melakukan perhitungan terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sehingga Piutang Usaha pada Neraca disajikan terlalu besar, beban usaha disajikan terlalu kecil sementara SHU pada Laporan Hasil Usaha disajikan terlalu besar. Pihak KUD Sawitra belum memisahkan Piutang Anggota dengan Piutang Non Anggota. Penyajian Laporan Sisa Hasil Usaha koperasi ini tidak memisahkan antara pendapatan usaha dari anggota dan pendapatan dari non anggota. KUD Sawitra belum menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota sehingga tidak dapat mengetahui bagaimana perkembangan koperasi dan pengaruhnya bagi perekonomian anggota. Perlakuan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra belum menerapkan akuntansi perkoperasian yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pihak koperasi melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan menggunakan metode rata-rata. Pihak KUD Sawitra sebaiknya memisahkan Piutang Anggota dengan Piutang Non Anggota. Dalam penyajian Laporan Sisa Hasil Usaha pihak koperasi sebaiknya memisahkan antara pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota. Sebaiknya Laporan Keuangan Koperasi dilengkapi dengan Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan sebaiknya pihak koperasi menyajikan perkiraan-perkiraan dan pos-pos pada laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kata Kunci : Akuntansi, Koperasi

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II      TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b>	
A. Pengertian Koperasi .....	8
B. Pengertian dan Tujuan Koperasi .....	10
C. Jenis Laporan Keuangan .....	12
1. Pengertian Neraca .....	14
2. Penyusunan Laporan Hasil Usaha .....	27
3. Penyajian Laporan Arus Kas .....	32
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota .....	35
5. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan .....	37

### **BAB III      GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah Singkat Koperasi .....	40
B. Struktur Organisasi Koperasi .....	41
C. Aktivitas Usaha Koperasi .....	44

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pencatatan Transaksi .....	46
B. Pengakuan Pendapatan dan Beban .....	47
C. Penyajian Neraca .....	48
D. Perhitungan Hasil Usaha .....	59
E. Laporan Arus Kas .....	63
F. Laporan Promosi Ekonomi Anggota .....	65
G. Catatan Atas Laporan Keuangan .....	66

### **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh, dan mandiri yang berakar dalam masyarakat serta mampu memajukan ekonomi anggotanya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya, jika badan usaha lain memiliki misi dan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya demi kelangsungan operasional perusahaan sedangkan koperasi memiliki misi dan tujuan sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat di sekitar koperasi tersebut.

Sebagaimana halnya pada perusahaan, koperasi juga membuat laporan keuangan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan koperasi. Secara garis besar laporan keuangan koperasi tidak berbeda dengan laporan keuangan badan usaha lainnya, perbedaan yang ada hanya terletak pada perkiraan-perkiraan tertentu seperti perkiraan modal dimana untuk koperasi modal tersebut terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah. Kemudian pada badan usaha lain dikenal istilah saldo laba sedangkan pada usaha koperasi disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU.

Laporan keuangan koperasi merupakan laporan mengenai pertanggung jawaban kegiatan usaha kepada pihak luar yang mempunyai hubungan dengan koperasi. Laporan keuangan koperasi menurut Standar Akuntansi Keuangan

terdiri dari : (1) Neraca yang menggambarkan jumlah asset dalam pengelolaan, kewajiban kepada kreditur koperasi, kekayaan bersih dari koperasi, (2) perhitungan hasil usaha yang menggambarkan kegiatan operasi dan hasil operasi koperasi dalam periode tertentu, (3) laporan arus kas yang memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode, (4) laporan promosi ekonomi anggota yang menggambarkan manfaat koperasi bagi anggotanya, (5) catatan atas laporan keuangan mengenai kebijaksanaan akuntansi dan informasi lainnya yang perlu diungkapkan.

Pada koperasi pencatatan, penilaian dan penyajian setiap transaksi yang terjadi sebaiknya memisahkan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan transaksi dengan non anggota, pendapatan tersebut juga sebaiknya dipisahkan berdasarkan jenis bidang usaha koperasi. Hal ini bertujuan agar jumlah maupun nilai transaksi dari anggota dapat merupakan salah satu petunjuk penting tentang manfaat yang dapat diberikan oleh koperasi kepada anggotanya.

Transaksi penjualan dari anggota, pada akhirnya nanti sebagian dibagi untuk anggota dengan jumlah sebanding dengan jasa yang diberikan kepada anggota. Sisa setelah dibagi kepada anggota dibagikan untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah bekerja dan dana sosial. Sedangkan penjualan dengan bukan anggota, dibagikan untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana karyawan, pegawai, dana pendidikan, koperasi, dana pembangunan daerah kerja dan dana sosial.

KUD Sawitra Kecamatan Kunto Darussalam merupakan koperasi unit desa dengan bidang usaha simpan pinjam, angkutan sawit, warung serba ada, usaha penjualan pestisida, pupuk dan obat anti hama (sprotan), penjualan produksi TBS di Sawitra Kunto Darussalam. Anggota koperasi ini adalah petani pemilik kebun sawit di Desa Sawitra sedangkan yang bukan anggota adalah masyarakat di Desa Sawitra yang melakukan transaksi jual beli dengan koperasi tapi tidak menjadi anggota KUD Sawitra. Transaksi yang terjadi tidak dipisahkan antara transaksi dengan anggota koperasi dan non anggota, misalnya transaksi penjualan dalam pencatatan dan pelaporan tidak dipisahkan antara penjualan kepada anggota dan non anggota.

KUD Sawitra menggunakan metode akrual basis dalam pengakuan pendapatan dan bebannya yaitu setiap pendapatan dan beban diakui pada saat terjadi transaksi. Sementara dalam penyajian di Neraca perusahaan menyajikan setiap perkiraan dalam beberapa pos yaitu aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, piutang lain-lain, asuransi dibayar dimuka dan perlengkapan kendaraan serta persediaan barang. Penyajian piutang usaha sebesar Rp. 2.347.363.178,84 belum dipisahkan berdasarkan piutang anggota dan non anggota sehingga akan menyulitkan dalam perhitungan hasil usaha yang akan dibagikan kepada anggota sebagai Sisa Hasil Usaha.

Menurut PSAK No. 27 (IAI; 2009:13) piutang koperasi diklasifikasikan berdasarkan Piutang Anggota dan Piutang Non Anggota. Hal ini berpengaruh terhadap perhitungan Sisa Hasil Usaha karena SHU untuk anggota seharusnya

berasal dari pendapatan dari anggota yang sebanding dengan jasa yang diberikan kepada anggota.

KUD Sawitra juga tidak melakukan pencatatan dan penilaian terhadap Penyisihan Piutang tak Tertagih, dimana berdasarkan PSAK No. 27 (IAI; 2009:15) setiap Piutang Usaha hendaknya dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang dihitung berdasarkan besarnya total Piutang Usaha yang ada.

Format Laporan Hasil Usaha koperasi belum sesuai dengan format menurut PSAK No. 27 yaitu pendapatan usaha dipisahkan berdasarkan pendapatan dari anggota dan dari non anggota. Pada Laporan Hasil Usaha pihak koperasi telah mencatat beban Pinjaman Sukarela sebesar Rp. 49.254.621,- perkiraan ini merupakan bunga simpanan sukarela yang disimpan di bank, tetapi oleh koperasi dicatat sebagai Beban Operasi. Sementara beban bunga pinjaman tunai sebesar Rp. 1.655.200 dicatat sebagai beban Administrasi dan Umum seharusnya beban ini merupakan beban usaha karena berkaitan langsung dengan kegiatan usaha koperasi.

KUD Sawitra belum menyajikan laporan promosi ekonomi anggota yang menggambarkan peningkatan ekonomi anggota dari waktu ke waktu berdasarkan kegiatan operasional koperasi serta laporan arus kas selama 1 (satu) periode. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul:



## **ANALISIS AKUNTANSI KOPERASI PADA KOPERASI UNIT DESA SAWITRA KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis membuat suatu perumusan masalah, yaitu : "Apakah penerapan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra telah sesuai PSAK No 27 Tahun 2009"

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra telah menerapkan akuntansi perkoperasian sesuai PSAK No 27 Tahun 2009.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis, menambah wawasan dalam penerapan akuntansi perkoperasian.
- b. Bagi pengurus koperasi, memberi masukan mengenai penerapan akuntansi perkoperasian.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai referensi dalam penelitian sejenis.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini penulis laksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra Kecamatan Kunto Darussalam.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengurus koperasi dan petugas koperasi bagian administrasi mengenai kegiatan usaha, sejarah koperasi, struktur organisasi, aktivitas usaha, dan kegiatan akuntansi serta keuangan.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang telah disusun sebelumnya oleh pihak koperasi dalam bentuk yang sudah jadi berupa laporan keuangan koperasi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan karyawan koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang meliputi : aktivitas koperasi, sejarah koperasi, kebijaksanaan operasional serta kebijaksanaan dibidang akuntansi.
- b. Dokumentasi yaitu dengan memfotocopi data keuangan koperasi yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang terdiri dari 5 (lima) bab, untuk lebih jelasnya penulisan skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Dalam bab ini dikemukakan mengenai pengertian dan tujuan koperasi, pengertian dan tujuan akuntansi, jenis-jenis laporan laporan, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan, dan hipotesis.
- BAB III : Pada bab III ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, berisikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.
- BAB IV: Pada bab ini akan dikemukakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada koperasi, yakni tentang penyajian neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan manfaat ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.
- BAB V : Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Koperasi**

Ada beberapa pendapat mengenai koperasi, salahsatunya adalah menurut Edilius (2001: 19) yaitu sebagai berikut :

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 25 tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai :

Organisasi ekonomi, rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama dalam azas kekeluargaan.

Kemudian menurut Hadisucipto (2001:15) koperasi memiliki peranan ganda yaitu :

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dimaksudkan koperasi berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya. Adapun kebutuhan tersebut mungkin timbul karena, antara lain :
  - a) Ingin menghindarkan persaingan antar sesama anggota
  - b) Untuk melakukan pembagian pekerjaan menurut minat dan perhatian sehingga bermanfaat bagi kelompok dan individu yang terlibat di dalamnya.
  - c) Untuk mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat, tepat dan murah
  - d) Untuk memperoleh harga yang layak
  - e) Untuk mendapatkan keuntungan karena adanya pembayaran bersama

- f) Untuk mempersatukan potensi dari para warga
- g) Untuk menghindari diri dari pemerasan secara ekonomis

Dengan demikian jelaslah, bahwa koperasi harus mampu memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Misalnya dalam koperasi konsumsi tersedia pelayanan berupa barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Menurut (Edilius, 2001:23) koperasi memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut :

1. Koperasi sebagai sarana pendidikan dimaksudkan sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat kepada suatu kebersamaan. Dalam pengertian bahwa tidak melulu menitikberatkan kepada individualisme ataupun komunalisme saja, tetapi juga pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara individu dalam masyarakat. Dalam anggota koperasi dari individu diakui sebagai anggota, akan tetapi ikhtiar kerja tertujukan kepada kepentingan bersama.
2. Koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu upaya yang ingin dicapai melalui masalah-masalah seperti :
  - a. keadilan sosial
  - b. pemerataan dan
  - c. kepentingan masyarakat
3. Koperasi sebagai wahana pengimbang (*countervailing power*) dimaksudkan sebagai suatu pengimbang terhadap badan usaha non koperasi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), terutama dalam penguasaan sumber daya. Sebagaimana dimaklumi bahwa

sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat kelas bawah sehingga apabila mereka berhimpun dalam satu wadah koperasi akan mampu menggalang kekuatan yang diharapkan akan mampu turut bersaing dengan kedua badan usaha non koperasi tersebut.

Warga masyarakat yang menjadi anggota masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya secara terus menerus. Proses produksi, konsumsi, pemasaran, distribusi dan pelayanan ekonomis serta tata pelaksanaannya melalui koperasi sehingga semangat gotong royong yang sudah menjadi tradisi masyarakat dapat tumbuh berkembang dan diterapkan dalam berkoperasi.

Jenis koperasi telah dibedakan menjadi tujuh jenis, dan jika dilihat dari unit usahanya menurut Saragih (2000: 23) ada dua jenis koperasi yang cocok didirikan di Indonesia yaitu :

1. Koperasi usaha tunggal
2. Koperasi usaha majemuk.

Berikut ini uraiannya :

#### 1. Koperasi usaha tunggal

Koperasi usaha tunggal memberikan pelayanan atau usaha dengan hanya satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan saja. Adapun usahanya dapat berupa :

- a. Kegiatan menyimpan uang dan memberikan pinjaman disebut sebagai koperasi kredit
- b. Menjual barang-baang konsumsi, disebut sebagai koperasi konsumsi

- c. Memasarkan hasil produksi dari para anggotanya, disebut sebagai koperasi dan seterusnya.

Koperasi Unit Desa (KUD) pengertiannya adalah sebagai berikut (Edilius, 2000: 28):

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang dibentuk oleh warga desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam bentuk :

- a. bidang pertanian
- b. bidang industri
- c. bidang kerajinan
- d. bidang perikanan
- e. bidang peternakan
- f. bidang perdagangan dan sebagainya.

Adapun fungsi-fungsi dari KUD sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian pedesaan adalah sebagai berikut :

- a. Perkreditan
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.

## **B. Pengertian dan Tujuan Akuntansi**

Pengertian akuntansi seperti diuraikan oleh Kusnadi (2000:7) adalah sebagai berikut :

Akuntansi adalah suatu, seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang, menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian sistematisnya berdasarkan prinsip yang

diakui umum sehingga, para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu diperlukan dan dari padanya dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan dibidang ekonomi.

Sedangkan definisi dari akuntansi menurut Komite Terminologi AICPA

*(The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants)* sebagai berikut (Belkaoui. 2000: 38) :

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengolahan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Adapun tujuan akuntansi, menurut Suadi (2001: 3) terdiri dari dua bagian yaitu :

1 . Tujuan Umum

Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva kewajiban, aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban), modal, potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, aktifitas pembiayaan dan investasi.

2. Tujuan Kualitatif

Agar informasi keuangan memiliki kualitas, relevan, dapat dimengerti, berdaya uji, netral, cepat waktu, berdaya banding dan lengkap.

Penerapan akuntansi sifatnya tidak mutlak, melainkan berubah-ubah. mungkin saja penerapan antar perusahaan yang satu berbeda dengan yang lainnya. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban atau keterikatan kepada ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Untuk itu setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu pada Prinsip Akuntansi.

### **C. Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Harnanto (2002: 35) biasanya laporan keuangan suatu organisasi terdiri dari beberapa jenis yaitu :



1. Neraca
2. Perhitungan Rugi/Laba
3. Laporan perubahan posisi keuangan
4. Laporan laba yang belum dibagi

Adapun pengertian dari keempat jenis laporan keuangan tersebut menurut Edilius (2001: 178) adalah sebagai berikut :

1. Neraca adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan pada satu tanggal tertentu.
2. Perhitungan Rugi/Laba adalah satu daftar ikhtisar hasil dan biaya suatu perusahaan selama satu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan adalah suatu laporan yang tujuannya memberikan informasi mengenai berbagai perubahan perkiraan aktiva dan passiva pada satu periode, tertentu.
4. Laporan Laba Belum Dibagi adalah suatu bentuk laporan yang menunjukkan ikhtisar perkiraan laba belum dibagi pada akhir suatu periode.

Sedangkan khusus untuk badan usaha koperasi, dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009: 27.8) menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari

1. Neraca
2. Perhitungan hasil usaha
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun pengertian dari keempat jenis laporan keuangan tersebut menurut adalah sebagai berikut (Hadibroto, 2000: 25):

1. Neraca adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan pada satu tanggal tertentu.

2. Perhitungan Rugi/Laba adalah satu daftar ikhtisar hasil dan biaya suatu perusahaan selama satu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan adalah suatu laporan yang tujuannya memberikan informasi mengenai berbagai perubahan perkiraan aktiva dan passiva pada satu periode tertentu.
4. Laporan Laba Belum Dibagi adalah suatu bentuk laporan yang menunjukkan ikhtisar perkiraan laba belum dibagi pada akhir suatu periode.

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009: 5) adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
- b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tidak sekedar memberikan informasi keuangan saja tetapi juga mengenai kinerja manajemen dan pertanggungjawaban mereka atas sumberdaya yang dimiliki.

## **1. Pengertian Neraca**

Menurut Niswonger et. all (2001: 25) Neraca didefinisikan sebagai berikut:

Suatu daftar aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal satu bulan atau tahun.

Menurut Wirasasmita (2001: 12) mendefinisikan neraca badan usaha sebagai :

Suatu daftar baik yang disusun pada waktu berdirinya perusahaan/koperasi (neraca pembukuan), atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun

pembukuan/periode pembukuan masih berjalan (Neraca bulanan atau neraca antara) maupun yang disusun pada akhirnya tahun buku (Neraca Tahunan), dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk perldman *Scontro* atau *T Account* ataupun *Staffel* atau *Report Form*, dalam hal mana harta atau aktiva, hutang atau pasiva dan modal pada saat tertentu/periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk uang/nilai uang.

Dengan demikian neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, hutang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Angka-angka yang ada dalam neraca memberikan informasi yang sangat banyak mengenai keputusan yang telah diambil oleh perusahaan. Informasi tersebut dapat bersifat operasional atau strategis, baik kebijakan modal kerja, investasi maupun kebijakan struktur permodalan yang telah diambil oleh perusahaan.

Secara garis besar, neraca memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana perusahaan. Sisi sebelah kiri neraca (aktiva) merupakan sisi penggunaan dana perusahaan yakni berupa kebijakan investasi, baik investasi jangka panjang, maupun investasi jangka pendek yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan sisi sebelah kanan (passiva) menunjukkan sumber-sumber dana untuk membiayai investasi tersebut, baik sumber dana jangka panjang maupun sumber dana jangka pendek.

Sehubungan dengan badan usaha koperasi, ketentuan mengenal penggunaan aktiva pada koperasi, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 27.7) adalah :

1. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai

aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada umumnya aturan yang dipakai yang dapat dikelompokkan sebagai lancar jika suatu harta dapat diubah menjadi kas atau dapat digunakan untuk kewajiban lancar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus dimana yang lebih panjang waktu maka harta ini diklasifikasikan sebagai lancar.

Klasifikasi aktiva lancar:

1. Harta tunai/ kas/ bank
2. Piutang
3. Persediaan (barang dagangan)
4. Lain-lain.

#### **a) Kas dan Bank**

Kas dan Bank adalah uang kas atau surat berharga, sejenis kas baik yang di dalam koperasi maupun yang ada di bank, yang dapat digunakan atau seketika dan diterima sesuai dengan nilai oleh umum (Hadibroto, 2000: 28).

#### **b) Piutang**

Agar pengertian mengenai piutang menjadi lebih jelas, maka berikut ini pengertian piutang menurut Baridwan (2001: 125) adalah sebagai berikut:

Piutang merupakan tagihan atas klaim perusahaan atas uang, barang-barang atau jasa-jasa terhadap pihak lainnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 27.13) klasifikasi piutang pada koperasi terdiri dari:

1. Piutang yang timbul karena produk atau penyerahan jasa kepada anggota, sehubungan dengan program penyaluran barang atau dana kredit dari pemerintah maupun karena kegiatan usaha lainnya.
2. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa kepada bukan anggota sehubungan dengan program penyaluran barang atau dana kredit dan pemerintah maupun karena kegiatan usaha lainnya.
3. Piutang kepada koperasi lain yang timbul sehubungan dengan transaksi-transaksi yang menyangkut program pemerintah di bidang pengadaan dan penyaluran produk. Pencairan sebagian atau seluruh piutang ini di luar wewenang koperasi yang berpiutang. Di samping itu, transaksi/dana yang mengakibatkan timbulnya piutang ini dilakukan/disimpan oleh koperasi lain. Piutang semacam ini lebih bersifat sebagai aktiva yang dititipkan pada koperasi lain, yang pencairannya diatur pihak lain. Contoh : piutang dana pengembangan. Piutang yang timbul sehubungan dengan pembagian sisa hasil usaha (SHU) dari koperasi lain yang pencairannya tergantung pada persyaratan tertentu.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum, klasifikasi piutang, baik itu dalam sebuah perusahaan maupun dalam sebuah koperasi adalah sama.

Menurut Kieso dan Weygandt (2001: 55) mengenai pengakuan piutang dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Dalam banyak transaksi piutang, jumlah yang akan diakui adalah harga pertukaran di antara kedua pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang merupakan hutang dari yang berhutang (pelanggan atau peminjam) dan umumnya dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis, seringkali berupa faktur.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa harga pertukaran piutang diakui sebagai jumlah hutang yang harus dibayar oleh si peminjam/pihak yang

berhutang yang dibuktikan dengan adanya beberapa dokumen seperti faktur dan lain-lain.

### **c) Persediaan**

Persediaan barang dalam badan usaha koperasi yaitu barang-barang yang dimiliki oleh koperasi atau belum dijual pada suatu saat tertentu, dengan maksud untuk dijual kembali dalam siklus operasional normal perusahaan (dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun).

Pada perusahaan dagang yang membeli persediaannya dalam bentuk yang sudah siap untuk dijual, hanya ada satu perkiraan persediaan yaitu perkiraan kemudian barang dagang.

Untuk membuat neraca pembagian ini sangat penting terutama untuk menentukan likuiditas. Pada umumnya persediaan dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok perolehan barang yang bersangkutan, yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan persediaan tersebut pada keadaan dan tempat sebagaimana adanya.

Barang-barang yang telah selesai dengan segera dapat dijual, sedangkan penilaian dilakukan dengan uang tunai. Untuk mengerjakan ini, selain kita membutuhkan waktu juga tenaga yang harus dibayar. Dengan demikian sebelum barang dapat dijual, terdapat pengeluaran untuk biaya penyimpanan dan resiko lainnya.

### **d) Investasi Jangka Panjang**

Investasi atau penyertaan yaitu perencanaan modal di luar koperasi. Investasi (penyertaan) diklasifikasikan menurut jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dapat berupa penyertaan pada pusat koperasi (PKPN), Penyertaan pada Koperasi Jasa Audit (KJA). Surat berharga atau Deposito Berjangka dalam bentuk dana yang sudah ada tujuan tertentu.

Berikut ini ketentuan mengenai investasi atau modal penyertaan yang dimuat dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009: 27.23) :

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicabut sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal ini modal penyertaan yang diterima selain uang, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.
2. Modal-modal penyertaan ikut menutupi resiko kerugian dan memiliki sifat yang relatif permanen, dan imbalan atas permodalan didasarkan atas hasil yang diperoleh oleh karena itu modal penyertaan diakui sebagai ekuitas.
3. Ketentuan mengenai perjanjian dengan permodalan yang menyangkut pembangian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penyajian investasi di neraca dinilai sebesar harga perolehan (*cost*) dari investasi/modal penyertaan tersebut.

Aktiva Tetap (*FixedAssets*)

Menurut Riva'i (2001: 29) yang dimaksudkan dengan aktiva tetap adalah :

Aktiva berwujud yang diproses ke dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Selanjutnya diuraikan mengenai pos-pos aktiva tetap adalah sebagai berikut:

- a. Alat-alat angkut.
- b. Equipment/peralatan kantor
- c. Bangunan
- d. Tanah

Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aktiva tetap merupakan suatu alokasi harga perolehan aktiva tetap ke periode-periode akuntansi. digunakan dengan memilih metode yang cocok sesuai dengan kondisi aktiva tetap yang dimiliki.

Menurut Edilius (2001: 65) pengertian aktiva tetap adalah sebagai:

Kekayaan perusahaan (koperasi) yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan hak yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan (koperasi).

Cara penyajian di negara aktiva ini dicatat sebesar harga, perolehan. Dan amortisasi aktiva lain secara sistematis selama masa manfaat. Bagian kanan dari neraca, adalah :

- 1. Kewajiban Jangka Pendek
- 2. Kewajiban Jangka Panjang
- 3. Ekuitas

**e) Kewajiban (Liabilities)**



Kewajiban pada badan usaha koperasi merupakan kewajiban kepada pihak luar bukan pemilik yang timbul akibat transaksi peroleh sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga mengakibatkan arus kas keluar dimasa yang akan datang (Hadibtoro, 2000: 32).

Menurut Munandar (2001: 2) kewajiban yang dimiliki badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya yaitu

1. Kewajiban lancar adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain kecuali pemilik perusahaan yang harus dipenuhi atau dilunasi dalam jangka pendek (kurang: dari satu tahun).
2. Kewajiban jangka panjang, adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain belum pemilik perusahaan yang harus dipenuhi atau dilunasi dalam jangka panjang.

#### **f) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka Pendek pada badan usaha koperasi terdiri dari

- a. Hutang Usaha
- b. Hutang Bank
- c. Hutang Pajak
- d. Hutang Simpanan anggota
- e. Hutang dana bagian SHU
- f. Hutang jangka akan jatuh tempo
- g. Biaya yang harus dibayar

#### **g) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang pelunasannya dalam waktu lebih dari satu tahun dan kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun yang akan datang dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban koperasi dapat timbul

karena pembelian barang dan jasa kepada anggota dan bukan anggota atau kepada koperasi lain, pembagian sisa hasil usaha dan kewajiban kepada koperasi lain untuk menanggung kerugian koperasi lain.

Dalam SAK (2009: 27.30) kewajiban jangka panjang ini terdiri dari pos-pos sebagai berikut:

1. Hutang bank
2. Hutang jangka panjang lainnya

Untuk penyajian kewajiban pada neraca diatur dalam SAK dengan ketentuan sebagai berikut :

Simpanan anggota tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai yang diserahkan anggota pada koperasi yang kehendak sendiri sebagai simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karena diakui sebagai kewajiban.

Simpanan sukarela harus diberlakukan sebagai hutang jangka pendek karena itu tidak dianggap sebagai kekayaan bersih. Hal ini disebabkan karena anggota dapat mengambil simpanan seketika.

Kewajiban yang timbul dari sisa hasil usaha seperti dana pembangunan daerah kerja, dana pendidikan, dana sosial, dan dana untuk pengurus dan

karyawan dipandang sebagai kewajiban, karena sisa hasil usaha yang merupakan hak koperasi hanyalah sisa hasil usaha yang disediakan untuk cadangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009: 27.10).

#### **h) Ekuitas**

Kekayaan bersih koperasi merupakan jumlah nilai kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomis koperasi atau selisih antara harta dan kewajiban.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 27.10) Indonesia Ekuitas Koperasi terdiri dari :

1. Modal anggota berbentuk simpanan pokok.
2. Model anggota berbenwk simpanan wajib.
3. Modal anggota berbentuk simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Modal penyertaan.
5. Modal sumbangan.
6. Cadangan
7. Sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Beberapa karakteristik dan penyajian modal koperasi yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (2009: 27.12) adalah sebagai berikut :

##### **1. Modal anggota**

- a. Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- b. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai putang simpanan pokok dan simpanan wajib.
- c. Kelebihan setoran simpanan pokok dan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal sertaan partisipasi anggota.

## 2. Modal Penyertaan

- a. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal.

Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut diakui sebesar harga pasar yang berlaku umum.

- b. Ketentuan mengenai pedangjian dengan pernodal yang menyangkut dengan pernbagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pernodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 3. Modal sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

## 4. Cadangan

- a. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. Pembayaran tambahan kepada anggota yang keluar dari koperasi atas jumlah pokok dan simpanan wajib dan simpanan lain-lain dibebankan kepada cadangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009: 27.4-6).

Secara formal, anggota dapat diakui sebagai anggota koperasi jika ia telah menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pokok saat pertarna, menjadi anggota. Disamping itu juga ia harus menyetor uang sejumlah tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib ini berfungsi untuk menutup resiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain. Penyajian nilai simpanan pokok dan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Rapat anggota dapat menetapkan jumlah setoran simpanan wajib bagi anggota baru yang jumlahnya setara dengan simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri, jika terdapat kelebihan nilai setoran simpanan diatas nilai nominal Simpanan pokok dan simpanan wajib pendiri, maka kelebihan tersebut diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota. Modal ini bukan milik anggota penyettor, karena itu tidak dapat diambil pada saat anggota keluar dari koperasi.

Apabila koperasi juga menetapkan simpanan lain selain simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai ekuitas, maka apabila terdapat jumlah penyettor lebih dari nilai nominal simpanan oleh anggota baru, maka kelebihan tersebut juga diakui sebagai modal penyetaraan partisipasi anggota.

Modal penyertaan ikut menutup resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen dan imbalan atas pemodal didasarkan atas sisa hasil usaha yang diperoleh. Dan dalam hal modal penyertaan diperoleh selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dicabut sebesar nilai pasar yang berlaku pada saat diterima. Dan apabila nilai pasar tidak dapat diketahui maka digunakan nilai taksiran. Dalam hal ini dijelaskan dalam cabutan atas laporan keuangan.

Berikut ini contoh bentuk Neraca koperasi :

Tabel III.1.  
Neraca Koperasi XYZ  
31 Desember 20X1 dan 20X0

<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>			<b>Hutang Lancar</b>		
- Kas dan Bank	Rp.	xxx	- Hutang	Rp.	xxx
- Investasi Jk Pendek		xxx	- Hutang Bank		xxx
- Piutang Usaha		xxx	- Hutang Pajak		xxx
- Piutang Pjman Anggota		xxx	- Hutang Simpanan Anggota		xxx
- Piutang Pnjman Non Anggota		xxx	- Hutang Dana Bagian SHU		xxx
- Piutang Lain-lain		xxx	- Hutang Jk. Pjg Akn Jth Tempo		xxx
- Persediaan		xxx	- Biaya Hrs Dibayar		xxx
- Pendapatan Akan Diterima		xxx	<b>Jumlah Kewjbn Jk. Pendek</b>		<b>xxx</b>
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>Rp.</b>	<b>xxx</b>	<b>Kewajiban Jk. Panjang</b>		
<b>Investasi Jk Panjang</b>			- Hutang Bank		xxx
Pen yertaan pada Koperasi		xxx	- Hutang Jk. Pnjng Lainnya		xxx
Penyertaan pada Non Koperasi		xxx	<b>Jml Kwjban Jk. Panjang</b>		
<b>Jml Investasi Jk Panjang</b>		<b>xxx</b>			xxx
<b>Aktiva Tetap</b>			<b>Ekuitas</b>		
Tanah/Hak atas Tanah		xxx	Simpanan Wajib		xxx
Bangunan		xxx	Simpanan Pokok		xxx
Mesin		xxx	Modal Penyertaan		xxx
Inventaris		xxx	Partisipasi Anggota		xxx
Akum Penyusutan		xxx	Modal Penyertaan		xxx
<b>Total Aktiva Tetap</b>		<b>xxx</b>	Modal Sumbangan		xxx
<b>Aktiva Lain-lain</b>			Cadangan		xxx
Ak. Tetap dlm Konstruksi		xxx	SHU Belum Dibagi		xxx
Beban Ditangguhkan		xxx	<b>Total Ekuitas</b>		<b>xxx</b>
Jml Aktiva Lain-lain			<b>TTL KWJBAN &amp; EKUITAS</b>		
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>xxx</b>			<b>xxx</b>

Sumber : IAI, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 27.4

Pembentukan cadangan ditujukan untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari

keanggotaan koperasi, cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Dan tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal pembayaran kepada anggota yang keluar, koperasi dapat menetapkan nilai tambahan dalam jumlah yang proposal dengan kekayaan bersih koperasi. Pembayaran tambahan tersebut dibebankan pada cadangan koperasi.

## **2. Penyusunan Laporan Hasil Usaha**

Laporan rugi laba merupakan laporan mengenai pendapatan, biaya-biaya dan laba perusahaan selama periode tertentu. Biasanya laporan ini disusun dengan dua pendekatan, yakni pendekatan kontribusi dan pendekatan fungsional. Pendekatan kontribusi membagi biaya-biaya ke dalam dua sifat pokok, yakni biaya variabel dan biaya tetap. Pendekatan ini biasanya dipergunakan dalam pengambilan keputusan manajemen berkenaan dengan perencanaan biaya, volume dan laba. Laporan rugi laba yang disusun dengan pendekatan fungsional memberikan informasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh setiap fungsi utama dalam perusahaan (fungsi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan umum serta fungsi keuangan).

Dalam pengukuran laba perusahaan, pendekatan fungsional dapat memberikan informasi yang jelas mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh setiap departemen (fungsi) yang ada dalam perusahaan atas penyimpangan yang terjadi terhadap target laba perusahaan.

Sisa hasil usaha adalah gabungan dari partisipasi netto dan laba atau rugi dengan anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta usaha perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

Perhitungan hasil usaha bertujuan menentukan sisa, hasil usaha yang diperoleh selama satu periode dengan membandingkan antara pendapatan dengan beban yang dikeluarkan selama, satu periode yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi sebagai berikut :

Sisa hasil usaha beroperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 27.6) ketentuan mengenai penyajian laporan perhitungan hasil usaha adalah :

1. Sisa hasil usaha tahun, berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi.
2. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, Maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban.
3. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba rugi kotor dengan non anggota.

Menurut Iswandi (2007: 115) pengelompokkan jasa kepada anggota sebagai beban atau pembagian sisa hasil usaha dapat diperjelas dengan uraian :

Sebagai pembagian sisa hasil usaha, bunga modal hanya diberikan apabila ada pembagian sisa hasil usaha yang berasal dari pelayanan kepada anggota. Apabila dalam satu tahun, koperasi menderita rugi dan untuk itu tidak terdapat pembagian sisa hasil usaha, maka bunga modal juga tidak diberikan. Sebaliknya apabila bunga modal dianggap sebagai beban, maka bunga modal akan selalu diberikan tanpa memandang koperasi menderita rugi atau memperoleh sisa, hasil usaha. Besarnya bunga modal tidak



tergantung pada sisa hasil usaha, tetapi ditentukan oleh besarnya simpanan, jangka waktu, dan tingkat bunga.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan pernbagian sisa, hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha tersebut diantaranya untuk anggota dana pendidikan, sosial, dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hal koperasi sebagai cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha tersebut dilakukan pada kahir periode pembukuan. Dan jumlah yang dialokasikan untuk selain koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, dan masih menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Tabel V.1.  
Perhitungan Hasil Usaha  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp. xxxx	xxxx
Beban Pokok	xxxx	xxxx
Partisipasi Netto Anggota	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
	Rp. xxxx	xxxx
<b>PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA</b>		
Penjualan	Rp. xxxx	xxxx
Harga Pokok	<u>( xxxx )</u>	<u>(xxxx)</u>
Laba (Rugi) Kotor dan Non Anggota	Rp. xxxx	xxxx
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp. xxxx	xxxx
<b>BEBAN KOPERASI</b>		
Beban Usaha	<u>( xxxx )</u>	<u>(xxxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp. xxxx	xxxx
Beban Perkoperasian	<u>( xxxx )</u>	<u>(xxxx)</u>
SHU Stl Beban Perkoperasian	Rp. xxxx	xxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>( xxxx )</u>	<u>(xxxx)</u>
SHU sbml Pos Luar Biasa	Rp. xxxx	xxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>( xxxx )</u>	<u>(xxxx)</u>
SHU sbml Pajak	Rp. xxxx	xxxx
Pajak Penghasilan	<u>( xxxx )</u>	<u>(xxxx)</u>
SHU setelah Pajak	Rp. xxxx	xxxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, Tahun 2009, hal. 27.3

### Unsur-Unsur Penyajian Hasil Usaha.

Perhitungan hasil usaha memuat pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. Menurut SAK (2009: 27.6) pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan laporan perhitungan, hasil usaha sebesar nilai transaksi selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba rugi kotor dengan non anggota.
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Menurut Smith dan Skousen (2001: 125) terdapat tiga prinsip penandingan biaya (*expense matching principles*), yaitu :

1. Pengasosiasian sebab akibat
2. Alokasi sistematis dan Rasional
3. Pengakuan segera

Pengasosiasian sebab akibat, maka beberapa biaya dapat diasosiasikan secara langsung dengan pendapatan tertentu. Biaya-biaya seperti upah dan bahan baku, biasanya dapat dikaitkan langsung pada biaya produksi perusahaan. Biaya lain seperti biaya produksi tidak langsung, diasumsikan dapat diasosiasikan dengan unsur persediaan dengan beberapa dasar lagi seperti halnya jumlah jam kerja atau jumlah jam mesin yang diperlukan untuk memproduksi barang apabila tidak ada hubungan sebab akibat yang langsung, dapat digunakan dasar pengukuran biaya yang lainnya. Dalam hal ini dilakukan upaya untuk mengaitkan biaya dalam suatu pola yang sistematis dan rasional dengan produk atau periode yang memperoleh manfaat darinya nilai perolehan yang di asosiasikan pada suatu periode dapat segera menjadi biaya yang di asosiasikan dengan pendapatan berjalan. Akhirnya biaya-biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan pendapatan, baik atas dasar sebab akibat maupun dengan alokasi sistematis dan rasional, maka harus diakui sebagai biaya periode berjalan.

### **3. Penyajian Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyediakan informasi laporan tentang arus kas suatu badan usaha berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. Laporan arus kas menyediakan informasi perubahan kas yang meliputi saldo awal, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

### **Unsur-unsur dalam Penyajian Laporan Arus Kas**

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang bersal dari kas yang berasal dari aktivitas operasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Berikut ini contoh penyajian arus kas menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung :

#### **a. Metode Langsung**

#### **Laporan Arus Kas**

PT. XYZ  
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 199X

<b>Aktivitas Operasi</b>			
Arus kas masuk :			
Penagihan dari pelanggan	xx		
Bunga dan deviden yang berhasil ditagih	xx		
Penerimaan operasi lainnya		<u>xx</u>	
Jumlah			xxx
Arus kas keluar			
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	xx		
Pembayaran bunga	xx		
Pembayaran operasi lainnya	xx		
Pembayaran pajak penghasilan	<u>xx</u>		
Jumlah			<u>xxx</u>
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		xxx	
<b>Aktivitas Investasi</b>			
Arus Kas Masuk			
Penjualan aktiva tetap produktif	xx		
Pengumpulan piutang, mis: piutang pd persh lain		xx	
Penjualan perusahaan lain, mis:bunga srt berharga			
Atau Saham yang dimiliki sebagai investasi		<u>xx</u>	
Jumlah			xxx
Arus Kas Keluar			
Pembelian, aktiva tetap, produktif	xx		
Pembelian hutang perusahaan lain	xx		
Pembelian perusahaan lain, mis:bunga srt berharga			
Atau pemilikan saham untuk investasi	<u>xx</u>		
Jumlah			<u>xxx</u>
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi			xxx
<b>Aktivitas Pendanaan</b>			
Arus Kas Masuk			
Pengeluaran obligasi, wesel tagih atau srt berharga	xx		
Penjualan saham perusahaan	xx		
Penghentian piutang pemilik dgn menerima piutang	<u>xx</u>		
Jumlah			xxx
Arus Kas Keluar			
Pembayaran deviden kepada pemegang saham	xx		
Reakuisisi pemilik saham perusahaan	xx		
Penghentian piutang pemilik dgn mebyr hutang	<u>xx</u>		
Jumlah			<u>xxx</u>
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			xxx
Kenaikan (penurunan) Kas			xxx
Kas Awal Tahun			xxx
Kas Akhir Tahun			xxx

b. Metode Tidak Langsung

Laporan Arus Kas  
PT. XYZ

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 199X

<b>Aktivitas Operasi</b>		
Laba Bersih		xx
Penyesuaian terhadap perubahan perkiraan operasi lancar		
Peningkatan dalam operasi jk. pdk seperti kas dan ekuivalen kas (-)	xx	
Penurunan asset operasi jk. pdk kecuali kas dan ekuivalen kas (+)	xx	
Peningkatan kewajiban pada operasi jk. pendek (+)		xx
Penurunan kewajiban operasi jk. pendek (-)		<u>xx</u>
Jumlah		xxx
Penyesuaian untuk bukan kas		
Penyusutan aktiva tetap (+)		xx
Amortisasi hartatak berwujud (+)	xx	
Non kas lainnya yang termasuk pendapatan bersih (+/-)	xx	
Jumlah		xxx
Penyesuaian untuk keuntungan/kerugian		
Laba dari penjualan aktiva (+)		xx
Kerugian penjualan aktiva (-)		xx
Jumlah		<u>xxx</u>
Kas Bersih dari Kegiatan Operasional		xxx
<b>Aktivitas Investasi</b>		
Arus Kas Masuk		
Penjualan aktiva tetap produktif	xx	
Pengumpulan piutang, mis: piutang pd persh lain	xx	
Penjualan perusahaan lain, mis:bunga srt berharga		
Atau Saham yang dimiliki sebagai investasi		<u>xx</u>
Jumlah		xxx
Arus Kas Keluar		
Pembelian, aktiva tetap, produktif	xx	
Pembelian hutang perusahaan lain	xx	
Pembelian perusahaan lain, mis:bunga srt berharga		
Atau pemilikan saham untuk investasi		<u>xx</u>
Jumlah		<u>xxx</u>
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi		xxx
<b>Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus Kas Masuk		
Pengeluaran obligasi, wesel tagih atau srt berharga		xx
Penjualan saham perusahaan		xx
Penghentian piutang pemilik dgn menerima piutang		<u>xx</u>
Jumlah		xxx
Arus Kas Keluar		
Pembayaran deviden kepada pemegang saham	xx	
Reakuisisi pemilik saham perusahaan		xx
Penghentian piutang pemilik dgn mebyr hutang	<u>xx</u>	
Jumlah		<u>xxx</u>
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		xxx
Kenaikan (penurunan) Kas		xxx
Kas Awal Tahun		xxx
Kas Akhir Tahun		xxx

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut :

1. Metode langsung

Dengan metode ini kelompok pertama dan penerima kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.

2. Metode tidak langsung

Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (*deferral*) atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Sedangkan dalam pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama dari penerimaan bruto dan pengeluaran bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan.

#### **4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota**

Laporan promosi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun. Laporan tersebut harus mencakup empat unsur:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dan pemasaran dan pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonominya dari simpan pinjam lewat koperasi.

#### 4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Karakteristik pelaporan laporan promosi ekonomi anggota menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 27.9):

1. Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan yang belum dibagi manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.
2. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dan transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan.
3. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankan.
4. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku.
5. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan, belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima anggota.

Berikut ini contoh penyajian laporan promosi ekonomi anggota pada koperasi :



Tabel V.3.  
Koperasi Pedagang Pasar “X”  
Laporan Promosi Ekonomi Anggota  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp. xxxx	xxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	( xxxx)	(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi		
Pemasaran Produk Anggota	<u>Rp. xxxx</u>	<u>xxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN		
BARANG UNTUK ANGGOTA		
- Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp. xxxx	xxxx
- Pengadaan Barang atas Dasar Harga Produksi	( xxxx)	(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi		
Pengadaan Barang untuk Anggota	<u>Rp. xxxx</u>	<u>xxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM		
LEWAT KOPERASI :		
- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp. xxxx	xxxx
- Kelebihan batas Jasa Simpanan Anggota	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi		
Penyediaan Jasa untuk Anggota	<u>Rp. xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Tahun Berjln	<u>Rp. xxxx</u>	<u>xxxx</u>
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan		
Untuk Anggota	<u>Rp. xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rp. xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, Tahun 2009. 27.6

## 5. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan. merupakan bagian terpadu (integral) dan penyajian laporan keuangan. Catatan yang digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosure*) yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi mengenai

- a. Pengungkapan pendapatan. dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota dan dengan non anggota.
- b. Kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
- c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.

2. Pengungkapan informasi antara lain mengenai

- a. Kerugian atau pelayanan utama, koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
- b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru bagi anggota.
- c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.
- d. Pengklasifikasian hutang dan piutang yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.
- e. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- f. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetap bukan milik koperasi.
- g. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.

- h. Penghasilan sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- i. Hak dan tanggungan pemodal penyertaan.
- j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Juga mengenai kebijaksanaan aktiva, pernbagian sisa hasil usaha, dan lain sebagainya, sehingga pengambilan keputusan dapat memahami isi dari laporan keuangan sebuah koperasi.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Singkat Koperasi**

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra Dasa Tanah Datar Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu didirikan pada tanggal 10 Juni 1995. Pada saat pendirian koperasi tersebut dilakukan pemilihan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra yang akhirnya diketuai oleh Bapak Herry Chaniago, Sekretaris Bapak W.S. Manullang dan beberapa orang pengurus lainnya dengan anggota berjumlah sebanyak 413 orang.

Pada tanggal 15 Juli 1995 koperasi ini resmi berbadan hukum dengan Akte No. 1977/BH/XIII, tanggal 15 Juli 1995. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1996 dilakukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil yang diwakili oleh Kanwil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Riau pada tanggal 28 Mei 1996 dengan Nomor Surat Keputusan:252/PAD/KWK.4/5.1/V/1996.

Sejak berdiri hingga saat ini, jenis usaha yang dilakukan KUD Sawitra semakin bertambah, hal ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan anggota koperasi. KUD Sawitra selalu berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya sehingga untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut, pihak koperasi mencoba menyediakan berbagai kebutuhan anggota dengan memperluas bidang usaha dari hanya usaha simpan pinjam menjadi usaha waserda, penyediaan pupuk dan saprodi dan lain-lain.

## **B. Struktur Organisasi Koperasi**

Sebagaimana halnya organisasi lain, maka sebuah koperasi perlu memiliki struktur organisasi yang bertujuan agar pelaksanaan tugas berjalan secara lancar dan pembagian wewenang serta tanggung jawab berlangsung dengan tertib karena terdapat pedoman yang mendasari pembagian tugas tersebut.

Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Suatu struktur organisasi yang efektif adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap individu-individu dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien adalah jika memudahkan mencapai tujuan-tujuan oleh organisasi dengan biaya minimum. Selain itu organisasi perusahaan yang baik adalah organisasi yang dinamis dan fleksibel. Struktur organisasi bukan sekedar untuk menunjukkan bentuk atau tipe organisasi melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggungjawab orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

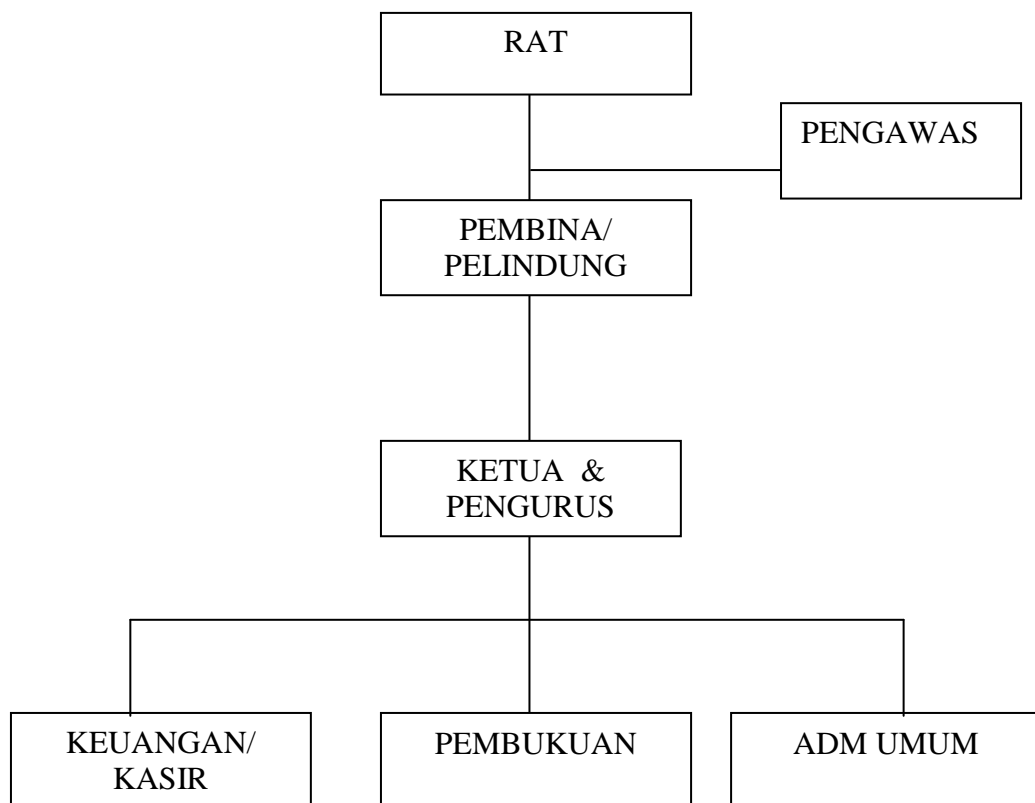
Struktur organisasi hendaknya juga mudah dirubah dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berlangsung. Perubahan-perubahan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan misalnya perluasan daerah pemasaran, peralatan baru tuntutan masyarakat dan lingkungan misalnya perubahan selera publik, perubahan ekonomi serta perubahan teknologi.

Bentuk organisasi yang baik akan sangat tergantung pada kondisi dari tiap-tiap perusahaan dan juga pada tujuan yang hendak tercapai. Hal ini disebabkan

karena bentuk organisasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah berbeda-beda. Bentuk dari struktur organisasi yang digunakan oleh suatu perusahaan akan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra mempunyai struktur organisasi yang bersifat sederhana. Karena selain organisasinya kecil juga memiliki anggota organisasi yang sedikit. Dengan demikian struktur organisasi pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra dapat digolongkan dalam bentuk organisasi garis (*line*) seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar III. 1.  
Struktur Organisasi  
Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra



Sumber : Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra

Adapun pembagian tugas untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota bertugas membuat keputusan-keputusan yang dibutuhkan dalam mengelola Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra. Keputusan-keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah seluruh anggota koperasi, dengan demikian pengurus, manajer, anggota serta karyawan koperasi harus mematuhi setiap keputusan yang dihasilkan oleh Rapat Anggota.

2. Pembina dan Pelindung

Bertugas dalam melakukan pembinaan baik kepada anggota, pengurus, ketua maupun karyawan koperasi.

3. Pengurus

Pengurus merupakan ujung tombak keberhasilan Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra, untuk itu agar koperasi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya pengurus koperasi harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya selama ini di dalam mengelola koperasi secara keseluruhan.

4. Pengawas

Pengawas bertugas melakukan pengawasan baik terhadap kinerja pengurus maupun dalam mengelola bidang usaha yang dimiliki koperasi. Pengawasan kemudian melaporkan setiap temuan-temuan yang ada kepada Badan Pelindung Koperasi.

5. Ketua

Bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan seluruh manajemen koperasi untuk dapat bekerja sesuai bidang masing-masing.

#### 6. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan bertugas melaksanakan tugas dalam mengelola keuangan koperasi, membuat laporan keuangan koperasi serta mengkoordinasikan dan mengawasi setiap catatan pembukuan koperasi, selain itu juga dalam hal penggunaan kas perusahaan.

#### 7. Kasir

Kasir bertugas menerima serta mengeluarkan kas perusahaan, melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran kas.

#### 8. Pembukuan

Bagian ini bertugas membuat atau mencatat pembukuan koperasi yang gunanya adalah untuk membuat laporan keuangan perusahaan.

#### 9. Administrasi dan Umum

Bagian Administrasi dan Umum bertugas menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi koperasi seperti membuat surat-surat dinas, membuat laporan tahunan, bulanan dan lain-lain.

### **C. Aktivitas Koperasi**

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang usaha bidang usaha simpan pinjam, angkutan sawit, waserda, sprotan (obata-obatan hama) dan unit produksi TBS. Sebagaimana koperasi lainnya, maka Koperasi Unit Desa (KUD) ini juga memiliki beberapa bidang usaha seperti :



- a. Usaha Simpan Pinjam, yaitu bidang usaha yang memberikan pinjaman berupa uang kepada anggota koperasi dengan pembayaran secara cicilan per bulan dan dikenai bunga sebesar 2%.
- b. Usaha Waserda, yaitu bidang usaha menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan makanan dan minuman bagi anggota maupun non anggota.
- c. Usaha Jasa Angkutan Sawit adalah bidang usaha pengangkutan sawit dari kebun petani anggota maupun non anggota koperasi, selanjutnya dibawa ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit).
- d. Usaha Sprotan adalah usaha menyediakan alat-alat dan obat-obabatan, pestisida, pupuk dll untuk para petani anggota maupun non anggota koperasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan akuntansi perkoperasian ditetapkan sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009, kebijakan akuntansi perkoperasian tersebut seperti telah diuraikan sebelumnya dalam tinjauan teori. Berikut ini penjelasan yang merupakan hasil analisa yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip akuntansi koperasi yang diterapkan di Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra.

#### **A. Pencatatan Transaksi**

Menurut prinsip-prinsip akuntansi setiap transaksi baik itu transaksi pendapatan dan transaksi pengeluaran seperti biaya-biaya dan beban diakui pada saat transaksi itu terjadi, misalnya pendapatan diakui pada saat pendapatan itu diterima dari konsumen.

Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan koperasi baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran biasanya selalu memperhatikan apakah transaksi itu dilakukan dengan anggota atau dengan non anggota koperasi. Hal ini karena dalam akuntansi koperasi pencatatan, penilaian dan penyajian pada laporan keuangan harus dipisahkan anggota dan non anggota. Tujuan dari pemisahan ini adalah agar nilai transaksi dari anggota dapat merupakan salah satu petunjuk penting tentang manfaat yang dapat diberikan koperasi kepada anggotanya.

Penerapan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra belum memisahkan antara pendapatan dari anggota dengan pendapatan

non anggota sehingga laporan keuangan tidak menggambarkan besarnya manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya.

## **B. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Dalam akuntansi pengakuan lebih ditujukan pada kapan suatu transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat. Sebagai contoh untuk mengakui pendapatan sewa, kapan pendapatan sewa tersebut diakui, begitu juga terhadap biaya, kapan suatu biaya diakui sebagai beban.

Kesalahan dalam menetapkan pengakuan pendapatan dan beban akan dapat mempengaruhi kewajaran penentuan laba, yang akhirnya akan mempengaruhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Adapun pengukuran lebih berhubungan dengan masalah jumlah rupiah yang harus dicatat setelah pendapatan atau biaya tersebut diakui, dengan kata lain tujuan utama dari pengukuran adalah untuk menentukan nilai dari suatu transaksi ekonomis tersebut.

Prinsip dalam menentukan pengakuan pendapatan dan beban ini, dapat berupa prinsip akrual (*accrual basis*) ataupun prinsip tunai (*cash basis*). Untuk *accrual basis*, pendapatan maupun beban pada dasarnya diakui sewaktu transaksi terjadi, sedangkan *cash basis* pendapatan atau beban baru diakui setelah ada penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas.

KUD Sawitra menggunakan metode akrual basis dalam mencatat pendapatan dan beban dalam suatu periode. Dalam pengakuan pendapatan pihak koperasi menggunakan metode akrual basis sehingga pada saat terjadi transaksi

penjualan, pihak koperasi langsung mencatatnya sebagai pendapatan, meskipun dalam penjualan tersebut terdapat penjualan secara kredit dimana pembayaran dilakukan pada periode berikutnya atau sesuai tanggal yang dijanjikan dan dicatat sebagai Piutang Usaha. Selanjutnya dalam pengakuan beban juga menggunakan metode akrual basis, sebagai contoh KUD Sawitra membayar Asuransi Kendaraan pada tahun 2008 sebesar Rp. 9.633.812,50. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendaharawan Koperasi, biaya Asuransi kendaraan tersebut dibayarkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan menggunakan metode akrual ini, berarti pihak koperasi telah mencatat pengeluaran untuk periode mendatang pada saat transaksi sebagai Asuransi Dibayar Dimuka. Pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan pihak koperasi telah tepat karena telah sesuai dengan prinsip penandingan pendapatan dan beban (*matching revenue to expense*) dan pada akhir tahun terlebih dahulu dilakukan jurnal penyesuaian.

### **C. Penyajian Neraca**

Neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, utang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Angka-angka yang ada dalam neraca memberikan informasi yang sangat banyak mengenai keputusan yang telah diambil oleh perusahaan. Informasi tersebut dapat bersifat operasional atau strategis, baik kebijakan modal kerja, investasi maupun kebijakan struktur permodalan yang telah diambil oleh perusahaan.

Secara garis besar, neraca memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana perusahaan. Sisi sebelah kiri neraca (*aktiva*)

merupakan sisi penggunaan dana perusahaan yakni berupa kebijakan investasi, baik investasi jangka panjang, maupun investasi jangka pendek yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan sisi sebelah kanan (*passiva*) menunjukkan sumber-sumber dana untuk membiayai investasi tersebut, baik sumber dana jangka panjang maupun sumber dana jangka pendek.

Neraca koperasi terdiri dari aktiva dan passiva atau kewajiban koperasi, pada pos aktiva lancar dibagi lagi menjadi beberapa perkiraan yang terdiri dari Kas, Bank, Persediaan, Pinjaman yang Diberikan dan lain-lain berurutan sesuai dengan tingkat likuiditasnya.

Perkiraan-perkiraan pada Neraca tersebut sebelum disajikan pada Neraca terlebih dahulu dicatat dalam buku besar sehingga setiap perubahan transaksi yang terjadi dan dapat merubah jumlah/nilai masing-masing perkiraan dalam terlihat dengan jelas pada buku besar tersebut. Namun demikian seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan dan penilaian untuk setiap transaksi yang terjadi.

Dalam penyajian aktiva tetap yang terdiri dari Peralatan yang merupakan peralatan yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari koperasi seperti komputer dan peralatan kantor lainnya serta perkiraan kendaraan. Peralatan disajikan sebesar harga perolehannya, harga perolehan tersebut kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga diperoleh nilai buku aktiva tetap tersebut.

Dalam pos-pos pada Neraca, pihak koperasi juga menyajikan perkiraan Perlengkapan Kendaraan sebagai Aktiva Lancar dimana cara pencatatan ini telah tepat.

#### **a. Kas**

Kas merupakan perkiraan pertama yang terdapat pada Neraca, Kas dapat digunakan sewaktu-waktu dan sesuai dengan sifat kas sebagai aktiva yang paling likuid sehingga kas disajikan pada urutan paling atas pada aktiva lancar. Perkiraan yang dimasukkan sebagai kas meliputi Kas Kecil dan Bank.

#### **b. Piutang Usaha**

Pada perkiraan piutang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra sering terjadi kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan piutang tersebut terletak pada saat terjadi pembayaran piutang dimana pencatatan piutang usaha belum berdasarkan piutang anggota dan non anggota sehingga akan menyulitkan dalam perhitungan hasil usaha yang akan dibagikan kepada anggota sebagai Sisa Hasil Usaha. Hal ini berpengaruh terhadap perhitungan Sisa Hasil Usaha karena SHU untuk anggota seharusnya berasal dari pendapatan dari anggota yang sebanding dengan jasa yang diberikan kepada anggota.

Piutang pada koperasi ini untuk periode 2008 sebesar Rp. 2.347.363.178,84. Pada Neraca pihak koperasi tidak menyajikan pos Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Seharusnya pihak koperasi membuat penaksiran atas adanya kemungkinan Piutang Tak Tertagih. Dalam menentukan besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih perusahaan tidak melakukan perhitungan yang akurat berdasarkan besarnya Piutang yang disalurkan. Penyisihan Piutang dihitung berdasarkan perkiraan besarnya piutang tak tertagih pada tahun sebelumnya yaitu kurang lebih 2%-3% dari besarnya piutang tahun. Dalam

menentukan besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih tidak berdasarkan perhitungan menurut metode penyisihan yang tepat seperti menggunakan metode penyisihan berdasarkan saldo piutang atau berdasarkan umur piutang. Seharusnya nilai beban penyisihan piutang tak tertagih setiap tahun selalu ada, sehingga harus diperhitungkan dengan Piutang Usaha yang ada. Berikut ini perhitungan beban piutang tak tertagih :

Piutang Usaha per 31 Desember 2007	Rp. 2.322.561.361,84
Piutang Usaha per 31 Desember 2008	<u>Rp. 2.347.363.178,84</u>
	Rp. 4.669.924.540,68 : 2
Piutang Usaha Rata-rata	= Rp. 2.334.962.270,34

Besarnya Beban Piutang Tak Tertagih adalah :  $3\% \times \text{Rp. } 2.334.962.270,34$   
 $= \text{Rp. } 70.048.868,11$ . Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode rata-rata maka dapat diperoleh rata-rata piutang untuk tahun 2007-2008 adalah sebesar Rp. 2.334.962.270,34 dengan demikian berdasarkan perhitungan di atas besarnya penyisihan piutang tak tertagih untuk KUD Sawitra pada tahun 2007 sebaiknya ditetapkan sebesar Rp. 70.048.868,11. Adapun jurnal yang seharusnya dibuat adalah :

Beban Piutang Tak Tertagih	Rp. 70.048.868,11
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp. 70.048.868,11

Adanya perhitungan beban Piutang Tak Tertagih akan menyebabkan nilai piutang usaha pada neraca disajikan lebih kecil karena harus dikurangi dengan beban piutang tak tertagih tersebut. Selain itu, dengan adanya beban piutang tak

tertagih yang diakui sebesar Rp. 70.048.868,11 pada tahun 2008, SHU berkurang sebesar Rp. 70.048.868,11 dan SHU menjadi sebesar Rp. 862.956.370,73. Selanjutnya Beban Usaha pada tahun 2008 meningkat sebesar Rp. 70.048.868,11 menjadi sebesar Rp. 1.163.802.568,02.

Selanjutnya piutang usaha pada KUD Sawitra ternyata tidak memisahkan antara Piutang Anggota dan Piutang Non Anggota, berikut ini penyajian piutang usaha pada Neraca KUD Sawitra Tahun 2007 :

Tabel IV.1.  
Penyajian Piutang Usaha pada Neraca Tahun 2008, 2007

No.	Perkiraan	2008	2007
I	Piutang Usaha		
	-Piutang Pupuk	Rp. 560.532.900,00	512,642,500.00
	-Piutang Waserda	103.089.350,00	98,583,261.00
	-Piutang Angkutan	10.263.480,00	9,725,400.00
	-Piutang Simpan Pinjam	<u>1.673.477.448,84</u>	<u>1,701,610,200.84</u>
		Rp. 2.347.363.178,84	2,322,561,361.84

Sumber : KUD Sawitra

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KUD Sawitra, diperoleh informasi bahwa piutang usaha sebesar Rp. 1.502.312.434,46 merupakan piutang yang berasal dari transaksi anggota sedangkan selebihnya adalah piutang usaha dari transaksi non anggota yaitu sebesar Rp. 845.050.744,38. Sedangkan Piutang Lain merupakan piutang usaha yang berkaitan dengan kegiatan operasional KUD Sawitra.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai perhitungan piutang anggota dan piutang non anggota pada tahun 2008, dapat dilihat perhitungan pada tabel berikut ini :



Tabel IV.2.  
Penyajian Piutang Usaha Anggota pada Neraca Tahun 2008

No.	Perkiraan	Jumlah
I	Piutang Usaha	
	-Piutang Pupuk	358,741,056.00
	-Piutang Waserda	65,977,184.00
	-Piutang Angkutan	6,568,627.20
	-Piutang Simpan Pinjam	<u>1,071,025,567.26</u>
		1,502,312,434.46

Sumber : KUD Sawitra

Sedangkan untuk Piutang Usaha Non Anggota untuk tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3.  
Penyajian Piutang Usaha Non Anggota pada Neraca Tahun 2008

No.	Perkiraan	Jumlah
I	Piutang Usaha	
	-Piutang Pupuk	201,791,844.00
	-Piutang Waserda	37,112,166.00
	-Piutang Angkutan	3,694,852.80
	-Piutang Simpan Pinjam	<u>602,451,881.58</u>
		845,050,744.38

Sumber : KUD Sawitra

#### **c. Asuransi Dibayar Dimuka**

Asuransi Dibayar Dimuka sebesar Rp. 9.633.812,50 merupakan asuransi bangunan milik koperasi yang telah dibayarkan untuk jangka waktu 3 tahun yang akan datang.

#### **d. Perlengkapan Kendaraan**

Merupakan perlengkapan kendaraan milik koperasi sebesar Rp. 5.147.600,- terdiri dari persediaan spare part truk pengangkut TBS. Perkiraan ini

jika akan disajikan pada Pos Aktiva Lancar pada Neraca sebaiknya disajikan dengan nama perkiraan Persediaan Perlengkapan Kendaraan.

#### **e. Persediaan**

Persediaan yang tercantum pada Neraca sebesar Rp. 111.866.985,- yang terdiri dari :

1. Persediaan pupuk sebesar Rp. 33.720.500,-
2. Persediaan waserda sebesar Rp. 76.001.485,-
3. Persediaan BBM sebesar Rp. 2.145.000,-

Harga perolehan persediaan ini dinilai berdasarkan harga beli pada faktur pembelian terakhir pada periode tahun buku. Metode pencatatan persediaan menggunakan sistim periodikal, yaitu pencatatan dilakukan hanya yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan pembelian saja. Selanjutnya pada akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan kemudian dibandingkan dengan pencatatan penjualan dan pembelian yang terjadi selama periode tersebut. Sedangkan penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (Masuk Pertama-Keluar Pertama).

#### **f. Aktiva Tetap**

Koperasi mencatat aktiva tetap sebesar harga perolehannya, sedangkan akumulasi penyusutan dicatat sebesar akumulasi biaya penyusutan yang terdapat pada daftar aktiva tetap. Pada tahun 2008 koperasi mencatat jumlah aktiva tetap sebesar Rp. 1.090.962.367,83 yang terdiri dari :

1. Tanah sebesar Rp. 25.900.000,-
2. Bangunan sebesar Rp. 179.018.335,-

- 3. Kendaraan sebesar Rp. 1.302.022.000,-
- 4. Peralatan Usaha sebesar Rp. 45.681.600,-
- 5. Peralatan Kantor Rp. 64.728.550,-

Sedangkan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 526.388.117,17

Dalam penilaian aktiva tetap pihak koperasi menilai harga perolehan aktiva tetap sebesar harga pembelian di tambah dengan biaya-biaya lain untuk memperoleh aktiva tetap tersebut seperti biaya angkut dan biaya lainnya hingga aktiva tersebut dapat digunakan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra.

#### **g. Aktiva Lain-lain**

KUD Sawitra juga memiliki perkiraan lain-lain sebesar Rp. 1.880.000,- yang merupakan perkiraan Surat berharga sebesar Rp. 3.000.000,- dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp. 1.120.000. Surat berharga tersebut merupakan surat penyertaan saham pada PT. Sawit Asahan Indah Rokan Hulu.

#### **h. Kewajiban Lancar**

Kewajiban lancar yang dimiliki koperasi ini merupakan hutang usaha jangka pendek sebesar Rp. 113.082.000,- hutang usaha ini terdiri dari :

- 1. Hutang Waserda sebesar Rp. 2.128.000,-
- 2. Hutang pada Abdul Rozak sebesar Rp. 17.360.000,- berupa hutang pembelian pupuk Urea, dan lain-lain yang merupakan hutang usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha koperasi kepada pihak ketiga.
- 3. Hutang kendaraan sebesar Rp. 437.755.090,24 yang merupakan hutang leasing kendaraan yang dibeli pihak koperasi secara kredit.

4. Hutang lain-lain sebesar Rp. 318.851.617,96 yang merupakan hutang pajak, hutang bangdes, hutang retribusi dan lain-lain. Hutang lain-lain merupakan hutang yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha koperasi.

Dalam pos Kewajiban Lancar juga terdapat perkiraan lainnya sebagai berikut :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Biaya yang Masih Harus Dibayar sebesar | Rp. 140.000.000,00 |
| 2. SHU Bagian Anggota                     | Rp. 0              |
| 3. Hutang Dana-dana                       | Rp. 157.792.847,81 |
| 4. Simpanan Sukarela                      | Rp. 767.870.202,00 |

Biaya Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 140.000.000,- merupakan biaya Rapat Anggota Tahunan untuk periode 2008 yang harus dikeluarkan pihak koperasi.

#### **i. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang terdiri dari hutang jangka panjang yang dimiliki koperasi sebesar Rp. 375.000.000,- hutang jangka panjang adalah hutang kendaraan (Leasing kendaraan) yang belum jatuh tempo.

#### **j. Kekayaan Bersih**

Penyajian Kekayaan Bersih koperasi pada KUD Sawitra ternyata cukup tepat, hal ini dapat dilihat dari rincian perkiraan Kekayaan Bersih yang jumlah totalnya sebesar Rp. 2.016.925.991,64, perkiraan ini terdiri dari :

1. Simpanan Pokok	Rp. 10.320.000,00
2. Simpanan Wajib	Rp. 98.712.000,00
3. Donasi	Rp.220.844.281,00
a. Anggota KUD Sawitra	Rp. 80.844.281
b. PT. Sawit Asahan Indah	60.000.000
c. PTPN V Sei Intan	50.000.000
d. Dinas Koperasi & UKM Rohul	<u>30.000.000</u>
4. Cadangan	Rp.754.044.471,00
5. Hasil Usaha Tahun Berjalan	Rp.933.005.238,84

Berikut ini Neraca yang seharusnya dibuat oleh pihak KUD Sawitra Rokan

Hulu :

Tabel IV.4.  
KUD Sawitra  
Neraca

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007

AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR		
Kas dan Setara Kas	692,261,331.56	994,508,775.96	Hutang Usaha	113,082,000.00	71,955,000.00
Piutang Usaha			Hutang Kendaraan	437,755,090.24	28,250,000.00
Piutang Anggota	1,502,312,434.46	1,486,439,271.58	SHU Bagian Anggota	-	144,489,710.52
Piutang Non Anggota	<u>845,050,744.38</u>	<u>836,122,090.26</u>	Hutang Lain-lain	318,851,617.96	944,255,060.00
	<u>2,347,363,178.84</u>	2,322,561,361.84	Biaya SHU Dibayar	140,000,000.00	120,000,000.00
Penyisihan Piutang Tak tertagih	(70,048,868.11)		Hutang Dana-dana	157,792,847.81	98,090,580.00
Piutang Lain-lain	68,162,473.92	54,339,923.92	Simpanan Sukarela	<u>767,870,202.00</u>	<u>630,129,852.00</u>
Asuransi Dibayar Dimuka	9,633,812.50	367,000.00	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>1,935,351,758.01</b>	<b>2,037,170,202.52</b>
Perlengkapan Kendaraan	5,147,600.00	-	Hutang Jangka Panjang	<u>375,000,000.00</u>	<u>475,000,000.00</u>
Persediaan Barang	<u>111,866,985.00</u>	<u>82,609,014.00</u>	Total Hutang Jangka Panjang	375,000,000.00	475,000,000.00
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>3,164,386,513.71</b>	<b>3,454,386,075.72</b>			
<b>AKTIVA TETAP</b>					
Tanah	25,900,000.00	25,900,000.00	<b>KEKAYAAN BERSIH</b>		
Bangunan	179,018,335.00	156,845,335.00	Simpanan Pokok	10,320,000.00	10,320,000.00
Mesin			Simpanan Wajib	98,712,000.00	73,886,000.00
Kendaraan	1,302,022,000.00	931,022,000.00	Donasi	220,844,281.00	220,844,281.00
Peralatan Usaha	45,681,600.00	44,181,600.00	Cadangan	754,044,471.80	515,215,409.66
Peralatan Kantor	<u>64,728,550.00</u>	<u>44,494,050.00</u>	SHU Tahun Berjalan	<u>862,956,370.73</u>	<u>663,302,972.62</u>
	1,617,350,485.00	1,202,442,985.00	<b>Total Kekayaan Bersih</b>	1,946,877,123.53	1,483,568,663.28
Akum. Peny. Aktiva Tetap	<u>(526,388,117.17)</u>	<u>(663,690,194.92)</u>			
<b>Total Aktiva Tetap</b>	<b>1,090,962,367.83</b>	<b>538,752,790.08</b>			
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>					
Surat Berharga	3,000,000.00	3,000,000.00			
Akum. Amortisasi	<u>(1,120,000.00)</u>	<u>(400,000.00)</u>			
	1,880,000.00	2,600,000.00			
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>4,257,228,881.54</b>	<b>3,995,738,865.80</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN BERSIH</b>	<b>4,257,228,881.54</b>	<b>3,995,738,865.80</b>

Sumber : Data Olahan

#### **D. Perhitungan Sisa Hasil Usaha**

Perhitungan hasil usaha memuat pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. Menurut SAK, pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan laporan perhitungan, hasil usaha sebesar nilai transaksi selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba rugi kotor dengan non anggota.
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Perhitungan Hasil Usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra belum disajikan secara tepat, hal ini terlihat dari Laporan Rugi Laba Perbandingan (terlampir) dimana pendapatan usaha tidak disajikan sebagaimana mestinya. Pada laporan Hasil Usaha ternyata pendapatan Usaha disajikan berdasarkan kegiatan usaha koperasi yaitu Pendapatan Simpan Pinjam, Penjualan Pupuk dan lain-lain dan bukan berdasarkan pendapatan dari anggota dan pendapatan non anggota. Hal ini menyebabkan sulitnya membuat perhitungan untuk menentukan besarnya partisipasi anggota dan partisipasi non anggota. Mengenai pengakuan pendapatan tidak terdapat masalah karena kegiatan usaha koperasi ini umumnya berjangka waktu pendek (tidak lebih dari 1 tahun).

Pada perkiraan Harga Pokok Penjualan dicatat Persediaan Akhir sebesar Rp. 109.721.985,- sementara persediaan pada Neraca disajikan sebesar Rp. 111.866.985,-. Perbedaan ini disebabkan penyajian pada Harga Pokok Penjualan tidak mencantumkan persediaan BBM sebesar Rp. 2.145.000,-. Sementara pada Neraca terdapat persediaan BBM, perbedaan ini menyebabkan penyajian laporan keuangan tidak akurat. Seharusnya besarnya persediaan pada Laporan Sisa Hasil Usaha disajikan sama dengan persediaan pada Neraca.

Format Laporan Hasil Usaha koperasi belum sesuai dengan format menurut SAK yaitu pendapatan usaha dipisahkan berdasarkan pendapatan dari anggota dan dari non anggota. Pada Laporan Hasil Usaha pihak koperasi telah membebankan beban bonus pinjaman sebesar Rp. 19.914.000 dimana beban ini merupakan beban penjualan.

Beban ini dikeluarkan pihak koperasi untuk memberi bonus (THR) bagi anggota koperasi yang rutin melakukan pinjaman (kredit) ke Koperasi. Bonus diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 500.000,- per tahun dan biasanya dibagikan pada saat bulan puasa menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Begitu juga dengan beban Pinjaman Sukarela sebesar Rp. 49.254.621,- dan beban bunga pinjaman tunai sebesar Rp. 1.655.200. Perkiraan angsuran pokok bunga tidak dipisahkan dari angsuran bunga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencatatan piutang usaha ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sehingga akibatnya perkiraan pada Neraca belum menunjukkan keadaan transaksi yang sebenarnya.



Dalam hal pengakuan beban pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra, belum mencatat dan menyajikan biaya sesuai dengan ketentuan dalam akuntansi perkoperasian dimana biaya diakui sebagai biaya usaha dan biaya perkoperasian karena kedua jenis biaya ini memiliki manfaat yang berbeda.

Dalam penyajian beban, pihak koperasi belum memisahkan beban berdasarkan kriteria beban usaha dan beban perkoperasian, dimana kedua jenis beban ini memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda. Beban usaha merupakan beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha koperasi seperti beban penyusutan, beban pemeliharaan, beban alat tulis kantor dan lain-lain. Sedangkan beban perkoperasian adalah beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya anggota koperasi baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional misalnya untuk pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).

Adanya kesalahan dalam penyajian piutang usaha menyebabkan nilai SHU tahun berjalan dinyatakan terlalu besar, setelah dilakukan koreksi, maka berikut ini disajikan Perhitungan Hasil Usaha yang sebaiknya dibuat :

Tabel IV.5.  
KUD Sawitra  
Perhitungan Hasil Usaha  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 & 31 Desember 2007

	31-12-2008	31-12-2007
<b>PENDAPATAN JASA</b>		
Penjualan	3,418,548,500.00	2,610,804,200.00
Harga Pokok Penjualan	<u>(3,219,323,104.00)</u>	<u>(2,361,391,990.00)</u>
SHU Kotor Atas Penjualan	199,225,396.00	249,412,210.00
Pendapatan Jasa	2,226,676,401.09	2,087,913,443.00
SHU Kotor	2,425,901,800.09	2,337,325,653.00
<b>BEBAN-BEBAN OPERASI</b>		
Beban-beban Usaha	(1,163,802,568.02)	(1,021,563,074.00)
Beban Administrasi dan Umum	<u>(977,070,002.74)</u>	<u>(680,263,212.47)</u>
Jumlah Beban Operasi	(2,140,872,570.75)	(1,701,826,286.47)
SHU Operasi	285,029,229.34	635,499,366.53
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan Lain-lain	582,968,727.60	48,218,124.70
Beban Lain-lain	<u>(5,041,586.20)</u>	<u>(20,414,518.61)</u>
Selisih Pendapatan dan Beban Lain-lain	577,927,141.40	27,803,606.09
<b>SISA HASIL USAHA BERSIH</b>	862,956,370.73	663,302,972.62

Sumber : KUD Sawitra

#### **D. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan seluruh transaksi yang berkaitan dengan kas seperti transaksi penjualan jasa, transaksi pembayaran angsuran pinjaman, pembayaran jasa oleh pihak ketiga dan lain sebagainya. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra, telah menyajikan laporan arus kas sebagaimana mestinya. Arus kas tersebut sebaiknya diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari kas yang berasal dari aktivitas operasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Berikut ini bentuk laporan arus kas yang harus dibuat KUD Sawitra :

Tabel IV.6.  
Laporan Arus Kas  
KUD Sawitra  
Tahun 2008

ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN OPERASI	31-12-2008
SHU BERSIH	862,956,370.73
Beban Piutang Tak Tertagih	70,048,868.11
Beban Amortisasi	(137,302,077.75)
Penurunan Hutang Usaha	41,127,000.00
Kenaikan Hutang Kendaraaan	409,505,000.00
Penurunan Biaya YMH Dibayar	20,000,000.00
Kenaikan Hutang Dana-Dana	59,702,267.41
Penurunan Hutang Lain-Lain	(625,403,442.85)
Penurunan SHU Bagian Anggota	(144,489,709.31)
Penambahan Simpanan Sukarela	137,740,350.00
Kenaikan Piutang Usaha	(24,801,817.00)
Kenaikan Piutang Lain-Lain	(13,822,550.00)
Kenaikan Asuransi Dibayar Dimuka	(9,266,812.50)
Kenaikan Perlengkapan Kendaraan	(5,147,600.00)
Kenaikan Persediaan	<u>(29,257,971.00)</u>
	<u>(251,368,404.65)</u>
Kas Bersih yg Berasal dari Kegiatan Operasi	611,587,966.08
ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN INVESTASI	
Penurunan Hutang Jangka Panjang	(100,000,000.00)
Penambahan Bangunan	(22,173,000.00)
Penambahan Kendaraan	(371,000,000.00)
Penambahan Peralatan Usaha	(1,500,000.00)
Penambahan Peralatan kantor	(20,234,500.00)
Penambahan Aktiva Lain-lain	<u>720,000.00</u>
Kas Bersih yg Berasal dari Kegiatan Investasi	(514.187.500.00)
Simpanan Pokok	-
Simpanan Wajib	24,826,000.00
Cadangan	238,829,062.14
Pencairan SHU Tahun Lalu	<u>(663,302,972.62)</u>
Kas Bersih yg Berasal dari Kegiatan Pendanaan	<u>(399,647,910.48)</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas	(302.247.444.40)
Kas 1 Januari 2008	<u>994,508,775.96</u>
Kas 31 Desember 2008	692.261.331,56

Sumber : Data Olahan

## **F. Laporan Promosi Ekonomi Anggota**

Laporan promosi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun. Laporan tersebut harus mencakup empat unsur:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dan pemasaran dan pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra belum membuat laporan promosi ekonomi dalam laporan pertanggungjawabannya. Hal ini menyebabkan pengurus serta anggota koperasi tidak mengetahui manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari koperasi ini pada setiap akhir periode. Bentuk laporan promosi ekonomi yang sebaiknya dibuat sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7.  
Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra  
Laporan Promosi Ekonomi Anggota  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008

<b>PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN</b>	
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA</b>	
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA</b>	
- Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp. 3.219.323.104,00
- Pengadaan Barang atas Dasar Harga Produksi	<u>2.226.676.404,09</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi	
Pengadaan Barang untuk Anggota	Rp. 92.646.700,00
<b>MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM</b>	
<b>LEWAT KOPERASI :</b>	
- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp. 221.340.900,-
- Kelebihan batas Jasa Simpanan Anggota	<u>Rp. 178.650.400,-</u>
Penyediaan Jasa untuk Anggota	Rp. 42.690.500,-
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Tahun Berjln	Rp. 135.337.200,-
<b>PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN</b>	
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	
Untuk Anggota	<u>Rp. 862.956.370,73</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp. 998.293.570,73

Sumber : Data Olahan

### **G. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpadu (integral) dan penyajian laporan keuangan. Catatan yang digunakan untuk memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha.

Menurut PSAK No. 27 catatan atas laporan keuangan koperasi menyajikan pengungkapan (*disclosure*) yang memuat seluruh aktivitas koperasi mulai dari pendapatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha kepada anggota dan non anggota, serta uraian tentang beban usaha/operasional koperasi.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra telah menyajikan catatan atas laporan keuangan (terlampir), namun demikian catatan atas laporan keuangan tersebut belum disajikan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini karena catatan atas laporan keuangan tersebut hanya menyajikan jenis-jenis pendapatan koperasi per bidang usaha dan biaya-biaya per bidang usaha, sehingga fungsi catatan atas laporan keuangan yang seharusnya dapat memperjelas pemahaman pembaca laporan keuangan untuk mengetahui setiap transaksi yang tersaji tidak dapat terpenuhi..

Catatan atas laporan keuangan yang tepat adalah selain menyajikan pos-pos pada neraca dan laporan rugi laba juga menyajikan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang sebaiknya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan mengenai pengakuan piutang usaha, metode penyusutan yang digunakan dan lain sebagainya. Catatan atas laporan keuangan juga sebaiknya menyajikan pendapatan usaha sesuai dengan transaksi kepada anggota dan non anggota.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat beberapa kesimpulan serta saran sebagai hasil penelitian yaitu :

#### **A. Kesimpulan**

1. KUD Sawitra tidak melakukan perhitungan terhadap Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sehingga Piutang Usaha pada Neraca disajikan terlalu besar, beban usaha disajikan terlalu kecil sementara SHU pada Laporan Hasil Usaha disajikan terlalu besar.
2. Pihak KUD Sawitra belum memisahkan Piutang Anggota dengan Piutang Non Anggota.
3. Dalam penyajian Laporan Sisa Hasil Usaha koperasi ini tidak memisahkan antara pendapatan usaha dari anggota dan pendapatan usaha dari non anggota.
4. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra ini juga belum menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota sehingga tidak dapat mengetahui bagaimana perkembangan koperasi dan pengaruhnya bagi perekonomian anggota.
5. Perlakuan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra belum menerapkan akuntansi perkoperasian yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak koperasi melakukan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan menggunakan metode rata-rata.



2. Pihak KUD Sawitra sebaiknya memisahkan Piutang Anggota dengan Piutang Non Anggota.
3. Dalam penyajian Laporan Sisa Hasil Usaha pihak koperasi sebaiknya memisahkan antara pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota.
4. Sebaiknya laporan keuangan koperasi dilengkapi dengan laporan promosi ekonomi anggota.
5. Sebaiknya pihak koperasi menyajikan perkiraan-perkiraan dan pos-pos pada laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Suadi, 2000, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi Kesatu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Jakarta
- Baridwan, Zaki, 2001, *Intermediate Accounting*, Edisi Ketujuh, BPFE, Yogyakarta
- Belkaoui, Ahmad Riahi, 2000, *Teori Akuntansi*. Buku 1, Edisi 1, Terjemahan Herman Wibowo dan Marianus Sinaga, Salemba Empat, Jakarta
- Edilius, 2001, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2001, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hadisucipto, Suwirjo, 2001, *Serba-serbi Perkoperasian di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, Sofian Syafri, 2001, *Teori Akuntansi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harnanto, 2002, *Analisa Laporan Keuangan*, Penerbit AMP YKPN, Yogyakarta
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Iswandi, 2007, *Akuntansi Koperasi*, Edisi Revisi, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas, Andalas Padang
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Kieso, Donald E., Jerry J Weygandt, 2001, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ketujuh, Jilid Satu, Terjemahan Herman Wibowo, Binarupa Aksara, Jakarta
- Kusnadi H, 2000, *Akuntansi Keuangan*. Edisi Pertama, Universitas Brawijaya
- Munandar, M, 2001, *Pokok-Pokok Intermediate Accounting*. Edisi Keenam, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Niswonger, Rollin C., Phillip E. Fess dan Carl S. Warren, 2001, *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jilid I, Edisi Kesembilan Belas, Terjemahan Alfonsius Sirait, Helda Gunawan, Erlangga, Jakarta

Sadeli, Lili, 2006, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Cetakan Ketiga, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Saragih, Bungaran, 2000, *Praktek Koperasi di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Smith, Jay M. dan K. Fred Skousen, 2001, *Intermediate Akuntansi*, Edisi Kedelapan, Terjemahan Gunawan Hutaaruk, Erlangga, Jakarta

Undang-undang No. 25 tahun 1992, *Koperasi di Indonesia*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Wirasmita, Rivai, 2001, *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Pionir Jaya, Bandung

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Neraca Koperasi XYZ 31 Desember 20X1 .....	26
Tabel II.2. Perhitungan Hasil Usaha Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 .....	30
Tabel II.3. Laporan Arus Kas PT. XYZ Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 199X .....	33
Tabel II.4. Laporan Arus Kas PT. XYZ Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 199X .....	34
Tabel II.5. Koperasi Pedagang Pasar “X” Laporan Promosi Ekonomi Anggota Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 .....	37
Tabel IV.1. Penyajian Piutang Usaha pada Neraca Tahun 2008, 2007 ...	52
Tabel IV.2. Penyajian Piutang Usaha Anggota pada Neraca Tahun 2008..	53
Tabel IV.3. Penyajian Piutang Usaha Non Anggota pada Neraca Tahun 2008 .....	53
Tabel IV.4. KUD Sawitra Neraca Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 .....	58
Tabel IV.5. KUD Sawitra Perhitungan Hasil Usaha Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007 .....	62
Tabel IV.6. Laporan Arus Kas KUD 2008 .....	64
Tabel IV. 7. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra Laporan Promosi Ekonomi Anggota Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 ...	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Sawitra ...	42